

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran *public relations* telah didefinisi sejak lahirnya paradigma manajemen relasi pada sekitar tahun 1980-an (Susanti: 2014). *Public relations* atau hubungan masyarakat (humas) tidak hanya bertugas di bidang teknis yang berkaitan dengan citra, *brand*, atau identitas organisasi tetapi nilai humas akan bertambah jika berhasil menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Kajian terhadap aktivitas humas perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tidak hanya melihat jumlah/kuantitas publikasi di media massa tetapi nilai-nilai yang dipertukarkan dalam hubungan tersebut.

Nilai nilai yang dipertukarkan bukan hanya berupa uang, barang, dan jasa untuk membayar publikasi yang maksimal tetapi nilai dari hubungan tersebut menurut teori *organization-public relationship* (OPR) adalah adanya kontrol yang seimbang antara kedua belah pihak serta adanya kepercayaan, kepuasan dan komitmen dalam hubungan tersebut (Kriyantono, 2014:278-279). Nilai-nilai ini perlu dibangun, dibina dan dikembangkan agar relasi yang terjalin harmonis, berlangsung jangka panjang, saling menguntungkan dan saling memengaruhi.

Grunig dalam Kriyantono (2014:276) juga mengemukakan arti penting relasi yaitu relasi yang bertahan lama merupakan hasil program kerja *public relations* dalam suatu organisasi. Keberhasilan aktivitas *media relations* humas

dengan media tidak hanya mementingkan apa yang nampak seperti jumlah pemberitaan yang dipublikasikan di media, tetapi lebih kepada nilai-nilai yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dan menjalin relasi tersebut.

Tujuan humas termasuk humas pemerintah menjalin hubungan dengan media adalah memperoleh publisitas yang maksimal di media untuk menjaga dan meningkatkan citra pemerintah dimata publik dan stakeholdernya. Humas pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ruslan bertugas menyampaikan dan menyebarkan pembangunan daerah kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat akan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah jika citra pemerintah positif di masyarakat dan informasi yang disampaikan pemerintah tersebut dipahami dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Hubungan media menurut Jefkins (2003: 119) adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan tujuan membangun hubungan dengan media adalah untuk meningkatkan dan menjaga citra positif organisasi di mata publik dan *stakeholder*. Lesly dalam Saputra (2011:129) juga menjelaskan bahwa *media relations* adalah hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bagian humas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pemberian informasi dan pemberitaan serta media penerangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015 memiliki 7 kegiatan yaitu : Pelatihan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi, penguatan kelembagaan Bakohumas, penyediaan kalender promosi Pemerintah Daerah, liputan kegiatan pemerintah daerah, penerbitan Majalah Sasarina, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan kegiatan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan media sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian informasi dan pemberitaan. Sub bagian informasi dan pemberitaan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2009 memiliki tugas pokok melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik dan media lainnya guna memperjelas kebijakan pimpinan daerah dan membina hubungan dan kerjasama dengan kalangan pers dan media massa.

Dilihat dari porsi anggaran untuk masing-masing kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Humas Tahun Anggaran 2015, dua kegiatan yang terkait dengan media (penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan) memperoleh anggaran sebanyak 72 persen dari total anggaran bagian Humas. Jumlah belanja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah ini pada tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan dibanding dua tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2014 belanja kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah bertambah sebesar 47 persen dari anggaran kegiatan tahun 2013 dan pada tahun 2015 terjadi kenaikan 55 persen dari anggaran tahun 2014. Dari data diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan media menjadi perhatian dan mendapat anggaran prioritas oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Humas bermitra dengan 23 media massa. Bentuk kemitraan ini adalah Humas berlangganan dengan media tersebut dan media berkewajiban mempublikasikan berita tentang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Media yang berlangganan dan juga menjadi media publikasi tersebut adalah, SKH Media Indonesia, SKH Pos Metro, SKH Padang Ekspres, SKH Singgalang, SKH Haluan, SKH Kompas, SKH Tempo, SKH Rakyat Sumbar, Majalah Tempo, Majalah Gatra, Majalah Warta, Majalah Sindo, Tabloid Kontan, Media Sumbar, Warta Poros, Tabloid Zaman, Sinar Ekspres, Sumatera News, Pualigobat, Berita Online Antara, Padang Time.com. Warta Andalas dan Covesia.com.

Sejak tiga tahun terakhir Bagian Humas cukup intens menggunakan media, selain untuk merespon kepentingan media, kemitraan dengan media juga dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Pada tahun 2013 Humas bermitra dengan 23 media, tahun 2014 Humas bermitra dengan 31 media, tahun 2015 dengan 23 media. Pada tahun 2016 pada kegiatan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan membuka ruang lebih banyak untuk membangun kemitraan dengan media karena pada kegiatan tersebut tidak dicantumkan nama media yang bermitra dengan Humas pada tahun anggaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Informasi dan Pemberitaan, pada tahun 2016 Humas melakukan pendekatan kepada praktisi media yang bermitra dengan Humas Pemerintah Kabupaten Mentawai mengenai syarat media yang dapat bermitra dengan Humas. Salah satu syarat harus dipenuhi media agar dapat bermitra dengan Humas adalah untuk media harian wajib tayang 30 kali dalam sebulan dan media mingguan wajib tayang 1 kali seminggu. Selain itu untuk menyikapi buku Dewan Pers tentang media yang direkomendasikan oleh Dewan Pers, humas juga melakukan pendekatan melalui wartawannya agar media yang bermitra dengan humas memiliki badan hukum.

Berdasarkan buku data pers nasional tahun 2015 tersebut, untuk wilayah Sumatera Barat media yang direkomendasikan untuk dapat bermitra dengan humas adalah : Banua Minang, Haluan, Koran Padang, Padang Ekspres, Pos Metro, Rakyat Sumbar, Singalang, Baki News, Binews, Investigasi, Lintas Media, Minang News, Publik, Rakyat Sumbar, Sumbar Post, Target, Terobos, Wawasan,

Zaman dan Padang Expo. Menyikapi hal ini pada tahun 2017 humas juga akan memverifikasi dan menyeleksi media yang memiliki badan hukum dan eksistensi dalam pemberitaan untuk bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk dengan semua SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari berita yang dimuat di media *online wartaandalas.com, covesia.com, padang time.com* yang merupakan media yang bermitra dengan Humas Pemerintah Kabupaten Mentawai, masih ditemukan berita negatif tentang Pemerintah Kepulauan Mentawai, dengan judul berita: Satu pejabat Mentawai, diduga terlibat narkoba, Warga Mentawai pertanyakan banyaknya aset daerah tak jelas, Golput tinggi, KPU Mentawai: masyarakat enggan nyoblos Karena Pejabat Selalu Korupsi, Bupati Mentawai Diminta Segera Lantik Kades Simalegi Terpilih, Sorot Aset Yang Tak Jelas, Suherman : Pemda Mentawai Harus Terapkan Keterbukaan Informasi Publik, Mentawai Rawan Pernikahan Dini, Dua Terdakwa Korupsi Alat Kesehatan Mentawai di Pencara 4 tahun, Mobnas Mentawai di Kuasai Pejabat Rakus, Pejabat Kabupaten Kepulauan Mentawai, G Terlibat Narkoba, Banyak Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Hilang dan Tidak Terurus.¹ (*Lampiran 2*)

Selain berita negatif tentang pemerintah, indikasi ketidakharmonisan hubungan antara humas dengan praktisi media juga terlihat dari beberapa status

¹ <http://warta-andalas.com>, <http://www.covesia.com>, <http://padangtime.com>, diakses tanggal 21 Januari 2016 pukul 13.00 WIB

facebook wartawan, diantaranya : status *facebook* Heri Pam Alis yang merupakan Wartawan *Wartaandalas.com* dan Koran Padang, status Heriansyah Suprianto yang merupakan Wartawan Sumbar Kreatif dan status Irki Fear yang merupakan Wartawan Harian Singalang. Pernyataan ketiga wartawan tersebut di media sosial menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan wartawan terhadap humas. (*Print screen* pernyataan wartawan terlampir pada lampiran 3). Sejumlah persoalan terkait wartawan di Mentawai juga terungkap dari komentar pengguna *facebook* lainnya seperti masih ada wartawan yang tidak profesional dengan sebutan wartawan ambu-ambu².

Selain membuat pernyataan negatif tentang humas di media sosial, ketiga wartawan juga mengkritisi kinerja pemerintahan. Pernyataan wartawan ini juga dikomentari dengan nada yang sama oleh Wartawan lainnya seperti Wartawan Singalang, Wartawan Koran Padang, Wartawan Post Metro, Wartawan Pualigobat, Wartawan Tera Konsumen, Wartawan Radio Sasaraina, Wartawan Media Citra dan beberapa komentator lainnya. Kritik di media sosial terhadap kinerja humas dan kinerja pemerintah ini terjadi sejak 22 Januari 2016 sampai 25 Mei 2016. Di antara *postingan* tersebut adalah :

Sampai saat ini ini hubungan humas mentawai dengan pihak media semakin berjalannya waktu semakin tidak harmonis, karena kekecewaan media terlalu dalam, disebabkan tidak adanya kejelasan dalam penyebarluasan informasi pada kegiatan humas, namanya saja corong pemerintah.”

² Wartawan ambu-ambu adalah istilah yang muncul dikalangan wartawan yang bertugas di Mentawai untuk menggambarkan wartawan yang datang hanya setiap hari senin pada pagi hari ketika kapal ambu-ambu datang dan kembali lagi ke Padang dengan kapal yang sama pada sore harinya. Aktivitas wartawan ambu-ambu ini tidak melakukan liputan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi hanya melakukan aktivitas seperti wartawan bodrek.

Kita buat kesepakatan saja dengan Humas Mentawai, mau baik atau mau rusak biar kesepakatan ini jelas didepan rekan-rekan wartawan yang bertugas di mentawai, daripada bertambah besar persoalannya.

Bagusnya bekerjasama dengan pihak yang bisa diajak bekerjasama yang sifatnya saling menghargai daripada kerjasama yang tidak jelas. Terlalu banyak aturan dan mediapun diaturnya. Entah apa dasar mereka bisa mengatur media seenaknya. Sedangkan konteksnya kerjasama. Sekarang aturannya malahan dibuat media yang diaturnya.

Rekan-rekan wartawan daerah mentawai agar lebih berhati-hati, banyak oknum wartawan yang menuliskan berita plagiat, dan lebih anehnya lagi berita tersebut dijadikan berita berbayar tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu oleh humas.

Pembiaran merajalela di Pemkab Kepulauan Mentawai. Banyak saya temukan dilapangan tenaga kontrak yang bekerja di setiap dinas maupun UPT hanya datang ambil absen, duduk, ambil absen lagi dan pulang.

Kalau sudah melalaikan pekerjaannya sebagai PNS, laporkan saja ke ombudsman. Telusuri peraturan bupati terkait SK tenaga honorer. Selama ini belum ada yang melaporkan persoalan yan dianggap sepele karena belum ada yang mengajukan persolan tersebut.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah memasuki umur ke 16, tapi masih berjalan seperti kura-kura. Bersinergi antar SKPD saja sulit dilakukan, selama ini dinas hanya berjalan sendiri-sendiri.

Indikasi ketidakpuasan humas terhadap praktisi media yang bertugas di Mentawai juga disampaikan oleh Kasubag Informasi dan Pemberitaan (Wawancara tanggal 12 Februari 2016) bahwa masih banyak ditemukan wartawan yang belum menulis berita dengan benar. Menyikapi hal itu, Humas Pemerintah Kepulauan Kabupaten Mentawai pada tahun 2017 Humas akan mengajukan kegiatan “Fasilitasi Studi Kooperatif Media Massa”. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan jurnalistik wartawan yang bermitra dengan Humas Pemerintah Kabupaten Mentawai, agar wartawan dapat menulis dengan baik dan

benar sehingga wartawan dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah daerah kepada publik.

Sejumlah fakta diatas terlihat ketidakharmonisan pada relasi antara humas dengan praktisi media. Untuk itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut ***“Bagaimana relasi Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Praktisi Media ?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan relasi humas pemerintah kabupaten kepulauan mentawai dengan praktisi media, dengan uraian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kepercayaan dalam relasi antara Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan praktisi media.
2. Mendeskripsikan kepuasan dalam relasi antara Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan praktisi media.
3. Mendeskripsikan kontrol mutualitas dalam relasi antara Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan praktisi media.
4. Mendeskripsikan komitmen dalam relasi antara Humas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan praktisi media.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya kajian bidang komunikasi terutama kajian Humas Pemerintah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Humas pemerintah dalam perumusan kebijakan humas terkait *Media Relations*.

